

## STRATEGI PENATAAN PEDAGANG PELAKU USAHA KECIL DI AREA ENTROP JAYAPURA

Veralde Marthina Bless<sup>1)</sup>, Harmonis Rante<sup>2)</sup>, Dewi Ana Rusim<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

<sup>2) 3)</sup> Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Alamat Korespondensi:

e-mail: uncen.magisters2pww@gmail.com

### ABSTRACT

*The uncontrolled development of street vendors makes them occupy every empty space in the city even if it is a public facility. The street vendors illegally sell almost all pedestrian paths, open spaces, green lanes and other urban spaces. The existence of street vendors has positive and negative sides, thus making the existence of street vendors a dilemma for the city government in arranging them. One of the trading areas in Jayapura City that is widely occupied by street vendors is the Entrop area. This area is located between Jayapura and Abepura, so its position becomes strategic. The subjects referred to in this study are street vendors located along Jl. Kelapa Dua, Entrop, Jayapura City. The analysis method used in this study is a qualitative approach where research on data, findings and visualization in the field is carried out by prioritizing description, explanation and comparison which includes descriptive, assumptive, and normative. The street vendors operating in Entrop often occupy locations that are not actually intended for street vendors. The location used is the shoulder of the road along Jln. Kelapa Dua, Entrop Village, South Jayapura District, Jayapura City. Solutions that can be done to provide effective space and space to street vendors in Entrop, Jayapura City are regional planning by involving all regional stakeholders, relocating street vendors into the market and increasing the knowledge and participation of street vendors in waste processing.*

*Keywords: Structuring, Street Vendor, Entrop, Jayapura*

### 1. PENDAHULUAN

Tidak terkendalinya perkembangan PKL membuat mereka menempati setiap ruang-ruang kosong dipertanian sekalipun itu adalah fasilitas publik. Keberadaan PKL mempunyai sisi positif dan negative, sehingga membuat keberadaan PKL menjadi dilema bagi pemerintah kota dalam menatanya. Salah satu kawasan perdagangan di Kota Jayapura yang banyak ditempati oleh PKL adalah kawasan Entrop. Kawasan ini terletak di antara Jayapura dan Abepura, sehingga posisinya menjadi strategis.

Keberadaan PKL di Kawasan Entrop perlu di tata dengan baik karena mereka menempati lokasi yang seharusnya masih merupakan daerah milik jalan, yaitu bahu jalan dan trotoar.

Persoalan relokasi PKL di Kota Jayapura, sudah terjadi beberapa tahun terakhir, tepatnya pasca Perda yang berkaitan dengan relokasi pasar diterbitkan. Ada beberapa faktor yang membuat pedagang enggan untuk beralih ke kawasan yang ditetapkan melalui Perda ini. Dua diantaranya adalah karena akses yang sulit dijangkau oleh pembeli, dan lokasi saat ini berada di tempat yang strategis untuk kegiatan berdagang, sementara tempat yang baru masih belum jelas untuk penghasilan mereka. Lokasi baru yang disediakan Pemda Kota Jayapura, tidak cocok bagi para PKL untuk berdagang. Di sisi lain, berkembangnya sektor informal juga turut berkontribusi dalam hal perubahan pola sosial ekonomi di Kota Jayapura. Sebagaimana

diketahui, sektor informal telah menjadi bagian agenda perencanaan daerah.

Kenyataan bahwa persoalan pedagang Kaki Lima (PKL) sulit diatasi karena lokasi berjualan yang berbeda dengan seharusnya. PKL saat ini menggunakan area-area atau titik tertentu yang seharusnya menjadi ruang publik yang nyaman (Sari, 2003: 27).

Widodo, 2002 membedakan definisi sektor formal dan informal melalui perlindungan. Apabila sektor informal diartikan sebagai unit usaha yang memperoleh perlindungan ekonomi pemerintah, sektor informal sebaliknya, tidak memiliki perlindungan tertentu, meski di sisi lain pemerintah menawarkan berbagai program atau bantuan khusus untuk sektor informal. Menurut Todaro (2000: 351-352) ciri-ciri sektor informal diantaranya skala usaha produksi mikro dan sederhana; sebagian besar dikelola secara personal dan kemampuan terbatas; penghasilan sektor ini cenderung lebih sedikit; tenaga kerja tidak diproteksi sebagaimana tenaga kerja formal; sektor informal umumnya dampak dari ketimpangan peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal; keuntungan bukan tujuan utama tetapi sebagai jembatan untuk mempertahankan hidup; sebagian besar melibatkan anggota keluarga; dan berada di lingkungan yang biasanya tidak terlalu bersih. Sedangkan untuk sarana yang dipergunakan umumnya adalah gerobak, keranjang atau pikulan, warung semi permanen, kios sederhana, dan alas tertentu (Widjajanti, 2009).



a. Gerobak



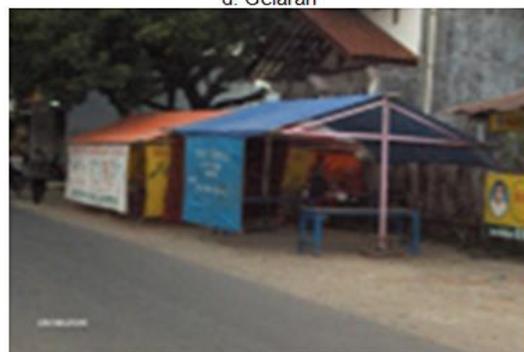
b. Kios



c. Pikulan/ keranjang



d. Gelaran



e. Warung semi permanen

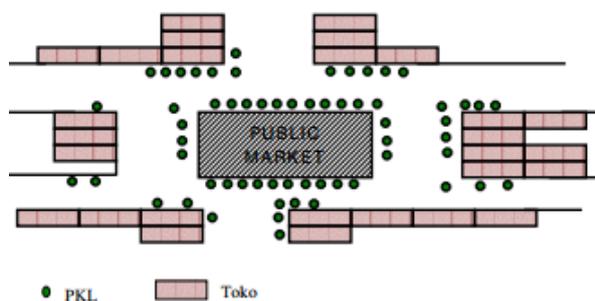
Gambar 1. Bentuk sarana berdagang PKL

Berdasarkan pola persebarannya, aktivitas PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 36-37) diklasifikasi melalui dua jenis.

1. Penyebaran berkelompok (*Focus Agglomeration*)

Pedagang informal jenis ini biasanya selalu mendapatkan keuntungan dari kegiatan sektor formal, dan pusat perbelanjaan

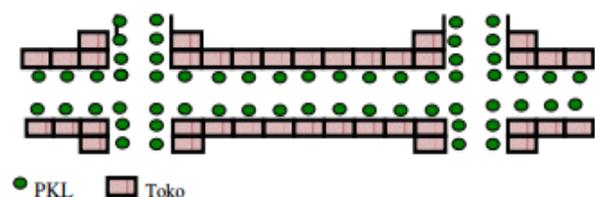
seringkali menjadi salah satu tempat yang menarik bagi sektor informal untuk menarik konsumen. Model distribusi seperti ini seringkali sangat dipengaruhi oleh pertimbangan aglomerasi, konsentrasi atau pemusatan penjual sejenis atau penjual dengan karakteristik produk serupa atau saling mendukung. Ini biasa ditemukan di pengecer makanan dan minuman. Pola penyebarannya adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pola Penyebaran Mengelompok  
Sumber: Mc. Gee dan Yeung (1977:37)

## 2. Penyebaran Memanjang (Linier Concentration)

Pola aktivitas didasari oleh pertimbangan aksesibilitas. Para pedagang informal menganggap lokasi ini berpengaruh pada besarnya pendapatan atau keuntungan, karena dengan menempati lokasi yang sangat mudah dijangkau maka mereka akan berpeluang besar untuk menarik konsumen. Pola ini ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 3. Pola Penyebaran Memanjang  
Sumber: Mc. Gee dan Yeung (1977:37)

Trotoar dan pinggir jalan, terutama di kawasan perkotaan yang padat, sering kita jumpai dipenuhi pedagang kaki lima sektor informal yang memanfaatkannya sebagai tempat berbisnis (Manning dan Effendi, 1996). Dengan demikian, keberadaan PKL dapat dilihat di sekitar lokasi komersial, pendidikan, perkantoran, dan aktivitas sosial masyarakat

lainnya. Dalam teori lokasi juga diasumsikan bahwa pengecer cenderung ke arah sentralitas konsumen dalam menemukan lokasi usahanya (Djojodipuro, 1992).

Karakteristik yang telah diuraikan diatas adalah satu dari bagian strategi pemasaran. Pemasaran menurut William J. Stanton (Ambarwaty, 2003) merupakan aktifitas yang menyenluruh untuk melakukan perencanaan, menetapkan harga, promosi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen maupun calon pelanggan.

Proses penataan atau pembinaan terhadap pedagang kaki lima kebijakan yang di terapkan dapat dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Secara umum kebijakan tersebut adalah dalam menjalankan usaha, pedagang kaki lima mesti memperoleh ijin penggunaan tempat usaha dari wali kota; ijin dicabut apabila ternyata di kemudian hari ada temua pelanggaran syarat, lokasi atau tempat usaha sudah bukan menjadi area yang ditetapkan sebelumnya, dan pemegang ijin melakukan pelanggaran aturan yang telah ditetapkan; PKL bertanggung jawab menjaga stabilitas dan kebersihan; dan tempat usaha tidak bersifat permanen atau dapat dibongkar.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kota Jayapura Papua tepatnya terletak di Entrop. Sepanjang pedagang kaki lima yang ada di Jln. Kelapa Dua, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1.



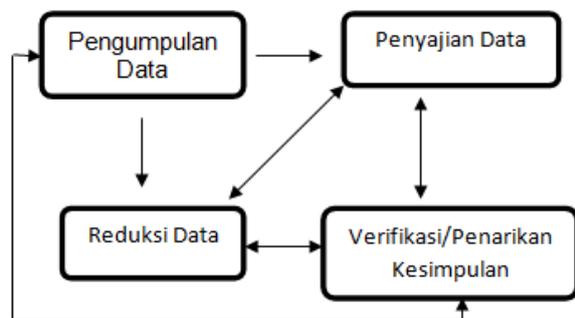
Gambar 4. Lokasi Penelitian

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana penelitian data, temuan dan visualisasi di lapangan dilakukan dengan pengkajian

mengutamakan uraian, penjelasan dan perbandingan (Sugiyono, 2009) yang meliputi:

1. Deskriptif, yaitu analisa melalui uraian-uraian, penertian-pengertian, maupun penjelasan-penjelasan. Berdasarkan jawaban-jawaban responden dibuat rangking, tabel, maupun persentase dan dianalisis secara deskriptif.
2. Asumsutf, yaitu memberikan anggapan-anggapan atas kondisi yang ada baik kondisi eksisting maupun kondisi yang diperkirakan didapat berdasarkan data yang telah ada dan dianggap layak serta dapat diterima oleh umum.
3. Normatif, yaitu analisis yang menyangkut keadaan yang seharusnya mengikuti suatu norma atau pedoman ideal tertentu. Paedoman tersebut dapat berupa standar yang ditentukan oleh industri tertentu, kondisi setempat, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kondisi yang ada.

Analisis data mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1992: 16) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 5. Skema analisa data interaktif Miles dan Huberman

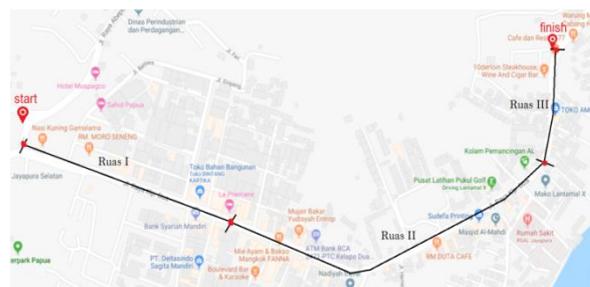
Sumber: Miles & Huberman (1992: 16)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek penelitian berupa semua pedagang kaki lima di sepanjang Jln. Kelapa -II, Entrop yang memulai aktivitasnya pada jam 07.00 WIT. Subjek penelitian terdiri dari 27 orang pedagang kaki lima. Observasi lapangan untuk memperoleh data primer dari pedagang kaki lima dilakukan mulai pukul 10.00-12.15 WIT. Lokasi penelitian kajian lokasi pedagang kaki lima terletak di sepanjang Jalan. Kelapa Dua, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Lokasi yang ditempati

PKL mulai dari depan Kantor Mandala Finance sampai ke Toko Bahan Bangunan CV. Conch, dengan jarak 1,77 km, yang terbagi atas tiga ruas, yaitu:

1. Kantor Mandala Finance - CV. Sagita Furniture, sepanjang 559 m
2. CV. Sagita Furniture - Mako Lantamal X, sepanjang 817 m.
3. Mako Lantamal X - Toko Bahan Bangunan CV. Conch, sepanjang 304 m



Gambar 6. Pembagian Ruas Lokasi Penelitian

Sumber: Google Maps (*edited*)

Keberadaan PKL tidak semata-mata mengganggu lingkungan atau aktivitas sosial lainnya. Di sisi lain keberadaannya memberikan dampak yang sifatnya positif. Beberapa diantaranya adalah :

- a. Membuka lapangan kerja. PKL yang merupakan salah satu bentuk usaha informal dianggap menjanjikan perbaikan ekonomi masyarakat kecil yang tidak memiliki kesempatan untuk terserap dalam sektor formal. Dengan menjadi PKL masyarakat kecil merasa bisa menjadikannya sebagai usaha memenuhi kebutuhan keluarga tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Jenis usahanya juga dapat disesuaikan dengan keahlian dan modal yang mereka miliki masing-masing.
- b. Memberikan harga yang lebih murah. Barang atau jasa yang menjadi usaha PKL sebagian besarnya di bawah harga produk yang ditawarkan sektor formal. Sehingga segmentasi pasar dan konsumen adalah mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Selain itu, produk usaha PKL dapat mendukung industri pariwisata.
- c. Penyumbangan PAD bagi pemerintah daerah. Jenis retribusi yang dikenakan pada para pedagang ada dua macam, yaitu retribusi sampah dengan kisaran mulai Rp. 150 yang setiap harinya, dan retribusi pasar yang

besarnya bervariasi dari mulai Rp. 300 untuk pedagang lemprakan dan PKL Rp. 1.000. Namun, persoalannya adalah aturan retribusi ini seringkali berubah. Sehingga mekanisme penarikan retribusi perlu dikaji ulang oleh pemerintah daerah.

Selain memberi manfaat positif, tidak bisa juga dipungkiri bahwa keberadaan PKL sering mengganggu dan menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain:

- a. Menempati ruang publik yang tidak tepat. Hal ini terjadi karena ruang-ruang di perkotaan yang sempit dan sulit diakses pembeli. Sehingga sebagian PKL menempati bahu jalan atau tempat-tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk membuka usaha.
- b. Menurunkan kualitas lingkungan. Secara konseptual kualitas lingkungan merupakan hubungan antara perilaku manusia dengan lingkungannya serta interaksi antara keduanya dalam menghasilkan suatu perilaku yang dapat memahami lingkungan. Dengan hadirnya PKL di ruang-ruang publik perkotaan pada sisi lain menimbulkan pelanggaran terhadap aturan tentang tata ruang.
- c. Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena seringkali PKL membuka usaha di sekitaran perdagangan formal. Pada kasus lain keberadaan PKL mengganggu lalu lintas kendaraan.

Dalam melakukan perencanaan suatu kebijakan paradigma yang dilakukan sekarang adalah perencanaan dengan pendekatan partisipatif yang mengikuti suatu pola. Berkaitan dengan perencanaan lingkungan di kawasan kelapa dua entrop dapat dilakukan dengan pendekatan mikro yang melibatkan partisipasi seluruh stakeholder yang ada dengan tahapan yang sesuai dengan langkah perencanaan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, maka peneliti menyimpulkan permasalahan yang berkaitan dengan PKL di kawasan kelapa dua entrop adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan PKL di kawasan Kelapa dua Entrop Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan berada pada tempat yang bukan peruntukannya yaitu trotoar dan bahu jalan. Hal ini berdampak negatif pada lingkungan seperti kemacetan lalu lintas,

banyaknya sampah yang menimbulkan pencemaran udara dan pencemaran air yang ditanggung oleh PKL maupun masyarakat yang ada disekitar kawasan.

2. Tidak adanya prasarana kebersihan (fasilitas pewadahan sampah) yang disediakan baik oleh pemerintah maupun PKL sendiri disumber timbulan sampah dan masih tingginya ketidakpedulian PKL dalam menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan, pedagang masih berperilaku negatif seperti membuang sampah yang dihasilkan begitu saja dibahu jalan dan trotoar.
3. Pelayanan kebersihan dari petugas kebersihan masih kurang, seperti masih adanya sampah yang belum terangkut di TPS tiap harinya.
4. Tidak adanya peraturan daerah yang mengatur khusus tentang PKL dan aktivitasnya sehingga belum ada landasan kerja bagi instansi terkait untuk bisa bekerja secara optimal.
5. Tidak adanya sanksi bagi pelanggar perda dan adanya kepentingan ekonomi, membuat PKL tetap beraktivitas di tempat yang bukan peruntukannya meskipun ada larangan dalam perda.
6. Tidak adanya pengolahan sampah di kawasan kelapa dua entrop. Sampah yang dihasilkan belum dimanfaatkan untuk dengan diolah menjadi kompos dan produk daur ulang.

Dalam analisis kondisi dilakukan dengan menggambarkan kondisi internal dan eksternal yang ada di kawasan kelapa dua entrop. Kondisi internal menunjukkan kekuatan dan kelemahan rencana pengelolaan sehingga diharapkan kekuatan ditingkatkan kembali dan diharapkan kelemahan dapat diminimalisir. Demikian juga dengan kondisi eksternal yaitu peluang dan ancaman, pengembangan strategi perlu dilakukan agar peluang yang ada dapat digunakan dan ancaman dapat diantisipasi dan ditanggulangi.

Berdasarkan analisis kondisi di atas maka peneliti menyusun suatu alternatif sebagai strategi untuk menentukan kebijakan berikut:

1. Menata kawasan dengan melibatkan semua *stakeholder* kawasan.

Dalam menata kawasan dengan melibatkan semua partisipasi aktif dari pelaku utama kawasan yaitu masyarakat dan PKL. Hal ini

sesuai dengan hasil wawancara dimana dalam usulan penataan masyarakat dan PKL sama-sama ingin dilibatkan dalam penataan kawasan.

2. Relokasi PKL kedalam pasar.

Dalam menata PKL ada peluang untuk relokasi ke dalam pasar karena kapasitas pasar masih mencukupi untuk menampung PKL masuk kedalam area pasar, dan sesuai dengan usulan masyarakat.

3. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta dalam pengolahan sampah.

Penyuluhan/pelatihan pada PKL tentang pengolahan sampah sehingga tumbuh paradigma memanfaatkan sampah dan partisipasi aktif PKL dalam mengelola sampah.

Berpijak dari alternatif kebijakan yang telah di tentukan diatas kemudian dilakukan penyusunan prioritas kebijakan yang di lakukan dengan skala prioritas berdasarkan usulan dari masyarakat dan PKL yang sesuai dengan urutan prioritas dari pemecahan masalah yang ada. Skala prioritas kebijakan dikelompokkan dalam 3 prioritas, yaitu:

1. Prioritas utama, pembenahan pengelolaan kawasan, yaitu:

- a. Menata kawasan dengan melibatkan semua *stakeholder* kawasan yang ada baik dari unsur masyarakat, PKL dan pemerintah daerah termasuk jalur angkutan dan parkir agar menjadi lebih nyaman bagi PKL dan masyarakat.
- b. Menyediakan prasarana sampah di kawasan kelapa dua entrop.
- c. Membuat peraturan daerah yang khusus mengatur tentang PKL beserta aktivitasnya dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan.
- d. Meningkatkan koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pengelolaan kawasan dan penanganan PKL.
- e. Melakukan relokasi PKL kedalam pasar.

2. Prioritas kedua, peningkatan peran serta masyarakat, yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta PKL tentang pengolahan sampah
- b. Memberi penyuluhan dan peningkatan kesadaran PKL terhadap peraturan yang ada dan peduli lingkungan.

c. Melakukan sosialisasi perda dan menumbuhkan kesadaran hukum PKL.

3. Prioritas ketiga, penataan peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan PKL dan kawasan, yaitu:

- a. Peningkatan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan kelapa dua entrop yang berbasis lingkungan bersih.
- b. Penegakan peraturan daerah dan penerapan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Sebagai upaya untuk mengetahui dampak lingkungan baik fisik maupun sosial ekonomi masyarakat, maka pilihan kebijakan yang di lakukan dengan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat didalamnya agar di hasilkan gambaran menyeluruh tentang dampak yang mungkin terjadi dalam pengelolaan kawasan kelapa dua entrop.

Pengambilan keputusan di lakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan PKL. Terlebih dahulu kajian dampak terkait alternatif kebijakan dilakukan untuk menentukan sasaran prioritas. Dalam rekomendasi perencanaan pengelolaan lingkungan dikawasan Kelapa dua Entrop Kabupaten Jayapura, maka langkah yang perlu di tempuh Pemda Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

1. Menata kawasan dengan melibatkan semua stakeholder kawasan yang ada baik dari unsur masyarakat, PKL dan pemerintah daerah termasuk jalur angkutan dan parkir agar menjadi lebih nyaman bagi PKL dan masyarakat.
2. Menyediakan prasarana sampah di kawasan kelapa dua entrop.
3. Melakukan relokasi PKL kedalam area pasar, karena berdasarkan hasil penelitian, area pasar pasar masih lowong untuk usaha PKL.
4. Membuat peraturan daerah yang khusus mengatur tentang PKL beserta aktivitasnya dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pengelolaan kawasan dan penanganan PKL sehingga kebijakn yang di lakukan pemerintah daerah lebih efektif dan terpadu.

6. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta PKL tentang pengolahan sampah, dengan memberikan pelatihan pengolahan sampah.
7. Penerapan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di sertai penyuluhan sehingga tumbuh kesadaran PKL terhadap peraturan serta tumbuh kepedulian terhadap lingkungan.
8. Pengembangan kapasitas aparat pemerintah daerah terkait tata kelola kawasan berwawasan lingkungan.

#### 4. KESIMPULAN

Dari penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pada PKL yang beroperasi di Entrop sering menempati lokasi yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi PKL. Lokasi yang digunakan adalah bahu jalan sepanjang Jln. Kelapa Dua, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura
2. Sektor-sektor yang terganggu oleh keberadaan PKL di Entrop, Kota Jayapura adalah terganggunya aktivitas lalu lintas, drainase kota, lingkungan dan mengganggu estetika (menimbulkan kesan sembrawut)
3. Solusi yang dapat dilakukan untuk memberikan ruang dan tempat yang efektif kepada PKL di Entrop, Kota Jayapura adalah penataan kawasan dengan melibatkan semua stakeholder kawasan, relokasi PKL ke dalam pasar dan meningkatkan pengetahuan dan peran serta PKL dalam pengolahan sampah.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwaty, Srie Hany. Studs Aktivitas Pedagang Kaki Lima dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Salatiga. 2003. Phd Thesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Widjajanti, Retno. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang. Teknik, 2009, 30.3: 162-170.
- Sari, Devita. Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Lingkungan Fisik Kota Pekanbaru. 2003. PhD Thesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Widodo, Ahmadi. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima. Universitas Diponegoro, 2000.

McGee, Terence Gary; YEUNG, Yue-man. *Hawkers In Southeast Asian Cities: Planning For The Bazaar Economy*. IDRC, Ottawa, ON, CA, 1977.

Manning, Chris; Effendi, Tadjuddin Noer. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. (*No Title*), 1985.

Djojodipuro, Marsudi. Teori lokasi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992.

Sugiyono, Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Alfabeta Bandung, 2010.

Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode–metode Baru, 1992, 2829-0747.

Todaro, Michael P.; SMITH, Stephen C. Pembangunan Ekonomi, edisi 9, jilid 1. Erlangga, 2006.